

Lembar permohonan tindakan pemberian bantuan di kantor registrasi dasar kependudukan

⑤

Yth Kepala○○○○○○○
Kepala pemerintah
berwenang terkait

Kami meminta pelaksanaan tindakan pemberian bantuan untuk perlindungan korban kekerasan rumah tangga, penguntitan, pelecehan anak dan tindakan serupa di kantor registrasi dasar kependudukan.

| | | Pemerintah berwenang | | Diterima | Dihubungi |
|----------|---|----------------------|--|----------|-----------|
| | | | | / | / |
| Teruskan | / | | | / | / |
| | / | | | / | / |
| | / | | | / | / |

Tahun Bulan Tanggal

| Nama | | | | | | Keterangan |
|---|--|---|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| Pemohon | Nama (tanggal lahir) Tanggal / / | Alamat | Nomor yang bisa dihubungi | Konfirmasi yang bersangkutan | | |
| Pelaku (jika terkonfirmasi) | Nama (tanggal lahir) Tanggal / / | Alamat | Lainnya | | | |
| Kondisi pemohon (centang dengan merifer lampiran) | A UU Pencegahan KDRT | | B UU Pengendalian Penguntitan | C UU Pencegahan Pelecehan anak | D Kasus serupa A-C | |
| Dokumen lampiran (centang dokumen terkait) | Keputusan perintah perlindungan (copy) | | Lainnya | | | |
| | Dokumen pelaksanaan seperti peringatan polisi berdasarkan UU Pengendalian | | | | | |
| Orang yang bisa dihubungi | (Jika Anda berkonsultasi dengan lembaga seperti kantor polisi, pusat dukungan konseling KDRT, atau pusat perlindungan anak, masukkan tanggal dan waktu konsultasi serta nama lembaga tersebut (selanjutnya disebut sebagai "lembaga konsultasi"), bagian yang bertanggung jawab, dll. selengkap mungkin.) Tahun Bulan Tanggal (nama lembaga konsultasi)) (Penanggung jawab) | | | | | |
| Pihak yang meminta tindakan (Terbatas untuk mereka yang memiliki alamat saat ini) | Centang di permintaan | Bagian yang meminta tindakan | | Alamat saat ini, dll | | |
| | | Publikasi registrasi dasar kependudukan | Alamat saat ini | sama dengan atas | | |
| | | Penerimaan copy sertifikat kependudukan (alamat saat ini) | Alamat saat ini | sama dengan atas | | |
| | | Penerimaan copy sertifikat kependudukan (alamat sebelumnya) | Alamat sebelumnya | | | |
| | | Penerimaan copy lampiran kartu keluarga (alamat terdaftar) | Alamat terdaftar | | | |
| | Penerimaan copy lampiran kartu keluarga (alamat sebelumnya) | Alamat terdaftar | | | | |
| Pemohon bersama yang meminta tindakan (terbatas bagi yang beralamat sama) | Hubungan dengan pemohon | Nama | Tanggal lahir | Hubungan dengan pemohon | Nama | Tanggal lahir |
| | | | | | | |
| (Jika tidak ada lampiran) | | | | | | |
| Pendapat lembaga konsultasi, dll | 1 Memastikan kebenaran atas situasi pemohon di atas. 2 Mengakui diperlukannya tindakan perlindungan bagi pemohon bersama. 3 Situasi yang dipahami lembaga konsultasi, kecuali dalam hal 1,2 di atas. (✕ada tidaknya perlindungan sementara, periode konsultasi, dll) Situasi yang dipahami: Tahun Bulan Tanggal Kepala (cap) (Penanggung jawab Kabag.....) | | | | Konfirmasi oleh pemerintah berwenang | Tanggal |
| | | | | | | Penanggung jawab |
| | | | | | Pihak kedua | |
| Keterangan | | | | | | |

(Cat)

● Isi kolom tebal.

● Verifikasi pihak yang bersangkutan saat mengajukan permohonan.

● Jika pemohon adalah orang selain perwakilan hukum, direktur pusat bimbingan anak, direktur fasilitas kesejahteraan anak, orang tua asuh, orang yang terlibat dalam bisnis rumah keluarga (family home), dll. harap tulis nama, tanggal tanggal lahir dan alamat pemohon serta nomor yang bisa dihubungi pemohon di kolom komentar.

● Ada kalanya konten pengajuan permohonan diverifikasi oleh lembaga konsultasi, dll.

● Tindakan pemberian bantuan bukan untuk menolak klaim terhadap tujuan yang tidak masuk akal (penyalahgunaan) sebagai hasil dari pemeriksaan yang ketat.

● Periode pemberian bantuan adalah satu tahun sejak tanggal kontak untuk dimulainya bantuan. Permintaan perpanjangan akan diterima mulai satu bulan sebelum batas waktu. Jika tidak ada permohonan, pemberian bantuan akan berakhir saat tenggat waktu berakhir.

● Jika ada perubahan konten formulir permohonan, silakan membuat permohonan ke pemerintah berwenang yang menangani pertama kali.